

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pola hubungan kemitraan pemerintah Kota Depok dengan media massa cetak lokal dan nasional dalam pengimplementasian *good governance* dapat dinyatakan “belum bisa” memberikan hasil yang signifikan bagi pembangunan dan mendorong terselenggaranya pemerintahan yang baik di Kota Depok. Adapun dua hal yang kiranya masih dibutuhkan peninjauan lebih lanjut bagi para pihak yang bermitra. Pertama, mengenai persamaan persepsi awal dari pembentuk kemitraan tersebut antara pemerintah selaku regulator dan fasilitator kebijakan publik dengan kelompok *pressing group*. Kedua, pentingnya pembagian kekuasaan yang proposional antara pemerintah dengan lembaga swasta (pers dan media massa) dan masyarakat agar pihak yang dalam hal ini lebih lemah dapat menuntut peran aktif pemerintah dan mendapatkan perlindungan hukum, sehingga hak masing-masing pihak tidak dirugikan begitupun kewajiban yang harus dapat dipertanggungjawabkan.
2. Keseluruhan dari faktor penghambat yang ditemukan dalam penelitian ini merupakan gambaran pelaksanaan kemitraan yang belum sesuai dengan

mengenai peran dan persepsi dari masing-masing pihak yang terlibat dari kemitraan ini. Maka dari itu penulis dapat menyimpulkan bahwa model kemitraan yang digunakan oleh pemerintah Kota Depok dengan media massa berbentuk *Subordinate union of partnership*, kemitraan atas dasar penggabungan secara subordinatif.

B. SARAN

Kemitraan bukan hanya sekedar hubungan kerjasama yang dititik beratkan pada suatu komitmen bersama dan keuntungan bagi para pihak yang bermitra, lebih dari itu kemitraan harus dapat memunculkan sebuah paradigma baru dimasyarakat dan negara yang mengarah kepada perbaikan dalam sebuah sistem.